

IMPLEMENTASI KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DI DESA (STUDI KASUS SITUS SITI INGGIL DESA BEJJIJONG KABUPATEN MOJOKERTO)

Pradana Tera Mardiatna
Program Studi Magister Ilmu Hukum Univeristas Surabaya
Pembimbing: Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M

ABSTRAK

Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu daerah yang aktif mengembangkan desa wisata dan pertanian, salah satu unit usaha BUMDesa "Wijaya" yang menonjol adalah pengelolaan kawasan wisata religi dan budaya di Kompleks Makam Siti Inggil. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan desa dalam pengelolaan aset desa, khususnya terhadap aset budaya dan pariwisata berupa situs sejarah seperti Situs Siti Inggil di Desa Bejjijong Kabupaten Mojokerto dan untuk mengkaji kesesuaian implementasi pengelolaan aset desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa (1) **Pemerintah Desa (Pemdes) memiliki legitimasi hukum yang kuat dan sah untuk mengambil alih serta mengelola Situs Siti Inggil. Kewenangan ini didasarkan pada undang-undang desa, cagar budaya, dan peraturan desa setempat, yang bertujuan untuk pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata.**(2) **Perlindungan hak Juru Kunci Situs Siti Inggil memiliki dua aspek: hukum dan sosiologis. Secara hukum, Pemdes berwenang penuh mengelola situs, tetapi wajib menjamin hak ekonomi Juru Kunci. Secara sosiologis, peran Juru Kunci sebagai penjaga tradisi harus dihormati melalui kerjasama yang transparan dan adil untuk menciptakan harmoni sosial.**

Kata Kunci: bumdesa, pengelolaan aset desa, kewenangan desa dalam pengelolaan aset

**IMPLEMENTATION OF VILLAGE AUTHORITY IN ASSET
MANAGEMENT IN VILLAGES (CASE STUDY OF THE SITI INGGIL
SITE IN BEJIJONG VILLAGE, MOJOKERTO REGENCY)**

Pradana Tera Mardiatna

Master of Law Program University Surabaya

Contributor: Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M

ABSTRACT

Mojokerto Regency is one of the regions actively developing tourism and agriculture villages. One of the prominent business units of BUMDesa “Wijaya” is the management of religious and cultural tourism areas in the Siti Inggil Tomb Complex. The purpose of this study is to analyze the implementation of village authority in the management of village assets, particularly cultural and tourism assets in the form of historical sites such as the Siti Inggil Site in Bejjong Village, Mojokerto Regency, and to examine the suitability of the implementation of village asset management with the provisions of laws and regulations. This study uses a sociological-juridical approach. The results of this study explain that (1) the Village Government (Pemdes) has strong and legitimate legal authority to take over and manage the Siti Inggil Site. This authority is based on village laws, cultural heritage, and local village regulations, which aim to preserve culture and improve community welfare through tourism. (2) The protection of the rights of the Caretaker of the Siti Inggil Site has two aspects: legal and sociological. Legally, the Pemdes has full authority to manage the site, but is obliged to guarantee the economic rights of the Caretaker. Sociologically, the role of the Caretaker as the guardian of tradition must be respected through transparent and fair cooperation to create social harmony.

Keywords: bumdesa, village asset management, village authority in asset management